

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ariman, Rasyid, Fahmi.Raghib, 2016. *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Azwar, Saifuddin, 2005, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Effendi, Tolib, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang.
- Harahap, M. Yahya, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S, 2016, *Prinsip- Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Soerjono, 2003, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- ND, Mukti Fajar, Yulianto. Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Prakoso, Abintoro, 2013, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2005, *Hukum Pidana Materiil*, Kurnia Kalam, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Soekamto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Suratman, Philips. Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Suyanto, Bagong, 2005, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, Prenada Media, Jakarta.
- Syamsuddin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nasehudin, Toto.Syatori, Gozali.Nanang, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Pustaka Setia, Bandung.

Wiyanto, Roni, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

## **B. Internet**

Braithwaite, John, "Restorative Justice and a Better Future",  
[https://www.researchgate.net/publication/296832967\\_Restorative\\_justice\\_and\\_a\\_better\\_future\\_Crime\\_punishment\\_and\\_the\\_criminal\\_justice\\_system](https://www.researchgate.net/publication/296832967_Restorative_justice_and_a_better_future_Crime_punishment_and_the_criminal_justice_system), diakses 4 Mei 2021

DetikNews, "Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari",  
<https://news.detik.com/berita/d-1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari>, diakses 13 Mei 2021

Jahja, Adi Susilo, "Subyek, Responden, Informan dan Partisipan"  
<https://dosen.perbanas.id/subyek-responden-informan-dan-partisipan/>, diakses 12 Mei 2021

Kejaribone, "Analisa Konsep Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan", <https://www.kejaribone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan.html>, diakses 12 Mei 2021

Marshall, Tony F, "*Restorative Justice : An-Overview*",  
[http://www.antonioacasella.eu/restorative/Marshall\\_1999-b.pdf](http://www.antonioacasella.eu/restorative/Marshall_1999-b.pdf), diakses 24 April 2021

Schmid, Donald J, "*Restorative Justice : A New Paradigm For Criminal Justice Policy*", <http://www.nzlii.org/nz/journals/VUWLawRw/2003/4.html>, diakses 24 April 2021

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 Dan  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang  
Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.  
(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 50)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 18 Tahun 1960 tentang  
Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-undang Hukum  
Pidana Dalam Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum  
Tanggal 17 Agustus 1945. (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 52 dan  
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1978)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan  
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-  
Undang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2010 Nomor 90 dan Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5145)

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan  
Koordinasi, Pengawasan Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian  
Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan  
Swakarsa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74  
dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298)

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 12 Tahun 2015 tentang  
Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan  
Minuman Oplosan (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015  
Nomor 15).

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang  
Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Daerah Istimewa  
Tahun 2014 Nomor 1).

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tanda Daftar  
Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012  
Nomor 1 Seri B).

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi  
Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun  
2018 Nomor 3).

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran  
(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 2).

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 2).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di Lingkungan Peradilan Umum.

Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan (tipiring).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan Dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947).